

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Said Zainal, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Azikin, Zainal, et.al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Belser, Patrick dan Uma Rani, , "*Minimum wages and inequality. In J. Berg (Ed.), Labour markets, institutions and inequality: Building Just Societies in the 21st Century*", Edward Elgar Publishing, 2015.
- Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, West Publishing, 1990.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dunn, William N., Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1999.
- Hardjoprajitno, P., et.al., Modul Hukum Ketenagakerjaan (Ketiga), Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Harper, J.H., Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Huda, Ni'matul, , Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Bandung: Kanisiun, 2011
- Ilmar, Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenada Kencana, 2014.

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

*International Labour Organization (ILO)*, Buku Pedoman Hak-Hak Pekerja Migran, Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2006.

J, Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021.

Kementerian Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Khakim, Abdul, Seri Hukum Ketenagakerjaan: Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2014.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Mulia, 2002.

Pius, Abdul dan Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Arkol, 1998.

Rahayu, Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rawls, John, *A Theory of Justice* Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Rukiyah dan Syahrizal, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Depok, UI Press, 2010

Sugiyarso, G. dan F. Winarni, Dasar- Dasar Akuntansi Perkantoran: Dilengkapi dengan Akuntansi Gaji, Upah, Lembur dan PPh Pasal 21, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.

Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2018.

## **B. Jurnal dan Makalah**

Haris, Oheo K., *Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan,* Jurnal Yuridika, Vol. 30, No. 01, 2015.

Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang,* Jurnal Pro Justisia, Vol. 7, No. 5 dan 6, 1997.

Hanoatubun, Silpa, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia,* Journal of Education, Psychology and Counseling, Vol. 02, No. 01, 2020.

Jati, Wasisto Raharjo, *"Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi,"* Jurnal Konstitusi, Vol. 09, No. 04, 2012.

Mangeswuri, Dewi Restu, *Dampak Penetapan Upah Minimum Provinsi 2021 Di Tengah Pandemi COVID-19,* Kajian Singkat Pusat Penelitian DPR RI, 2020.

Rani, Uma dan S. Ranjbar, *"Impact of Minimum wages on wage quantiles: Evidence from developing countries. Proceedings of the Policy Dialogue on Promoting Inclusion and Reducing Disparities in the Labour Market in Brazil and India"*, 2015.

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab,* Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 2000.

Trimaya, Arrista, *Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,* Jurnal Aspirasi, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang No 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809)

#### **D. Skripsi dan Tesis**

Rosas, Rezi Adha Putria, 2021, "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Penetapan Upah Karyawan CV. UB Berita Di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sulistiawati, Rini, 2012, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia", Tesis, Pontianak: Universitas Tanjungpura.

#### **E. Internet**

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://ntb.bps.go.id>, 19 September 2022.

Demo Buruh 25 November 2021, Ini Kabar dari DKI-Jabar-Jateng, <https://news.detik.com/berita/d-5826509/demo-buruh-25-november-2021-ini-kabar-dari-dki-jabar-jateng>, 20 September 2022.

Dukung Pengesahan UU Cipta Kerja, Apindo Beberkan Kelebihannya, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201016/9/1305823/dukung-pengesahan-uu-cipta-kerja-apindo-beberkan-kelebihannya>, 3 Oktober 2022

Gugatan Apindo Dikabulkan, Anies Wajib Turunkan UMP DKI 2022 jadi Rp4,5 Juta, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-wajib-turunkan-ump-dki-2022-jadi-rp45-juta.html>, 3 Oktober 2022.

Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, <https://hukum.kompasiana.com>, diakses 14 September 2022.

Melihat Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Hubungan Kerja, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-pandemi-covid-19-dalam-hubungan-kerja-lt5ef1b3c5338b6>, 20 September 2022.

Menaker Sebut Upah Tak Naik Jadi Jalan Tengah Pengusaha-Buruh,  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201027181745-92-563458/menaker-sebut-upah-tak-naik-jadijalan-tengah-pengusaha-buruh>, 20 September 2022.

Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid Bagaimana Aturannya?,  
<https://www.legalku.com/pemutusan-hubungan-kerja-di-masa-pandemi-covid-bagaimana-aturannya>, 2 Oktober 2022.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2018 terhadap Pemberian Upah Minimum Pekerja pada CV Dwi Makmur Abadi, <https://ojs.unud.ac.id/index.php.kertasemaya/view/52269>, 29 September 2022.

#### **F. Koran**

"Bencana Nasional Covid-19 (Bukan) Keadaan Memaksa", *Kompas*, 21 Agustus 2020.

"Kala Buruh Berharap ke Gubernur", *Bisnis Indonesia*, 2 November 2020.

"Upah Bukan Faktor Penentu", *Kompas*, 2 November 2020.

"Buruh Demo Serentak Tolak UU Ciptaker", *Republika*, 2 November 2020.

#### **G. Lain-lain**

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.